

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional ditujukan untuk mengembangkan daerah dan khususnya laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Di lain sisi pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bisa mandiri dalam mengelola penerimaan

daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Sutedi (2009) menyebutkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB dalam lingkup regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Supatoyo dan Tatu (2013) menemukan bahwa pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto

(PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Provisnis D.I Yogyakarta tahun 2006-2009 (%)

	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta (dalam persen)
2006	3,6 %
2007	2,6%
2008	3,2 %
2009	9,9 %

Sumber : BPS D.I Yogyakarta tahun 2006-2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami sedikit penurunan dari tahun 2006 ke 2007, kemudian meningkat hingga tahun 2009.

Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Bratakusumah dan Solihin (2001) menemukan bahwa otonomi

daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui peyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010, 3).

Sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pelimpahan kewenangan ini peranan keuangan daerah akan semakin penting karena pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola sumber dananya sendiri. Tambunan (2001) menyebutkan bahwa daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar. Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah perlu dikaji dan dioptimalkan potensi ekonomi daerah tersebut untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin meningkat penerimaan dari daerah sendiri, maka sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di Provinsi DIY.

Pendapatan asli daerah ini mempunyai komponen utama, yaitu penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, dan retribusi daerah. Mardiasno (1996) menyebutkan bahwa pajak daerah menurut merupakan pungutan yang harus dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut. Sedangkan, retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa yang nyata dari pemerintah daerah. Suhendi (2007) ditemukan dalam Rahayu (2011) menyebutkan bahwa semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Besarnya pendapatan asli daerah yang didapat pada suatu daerah menunjukkan standar kemandirian suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pada sisi keuangan daerah salah satunya adalah PAD dapat dilihat bahwa PAD yang diterima oleh pemerintah Provinsi DIY tahun 2008-2010 mengalami kenaikan. Tahun 2008 sebesar 547.887 milyar rupiah,

pada tahun 2009 sebesar 596.850 milyar rupiah, pada tahun 2010 621.736 milyar rupiah.

Dalam rentan waktu antara tahun 1996-2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

**Tabel Pendapat Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2006-2010 (jutaan rupiah)**

Tahun	PAD
2006	433757022
2007	420568426
2008	547887175
2009	596850802
2010	621736060

Sumber : BPS D.I Yogyakarta tahun 2006-2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah PAD dalam beberapa tahun . Ini mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat ada peningkatan PAD terhadap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kisaran tahun 2006-2010 berhasil meningkatkan PADnya dari 433.757 milyar rupiah pada tahun 2006 menjadi 621.7360 milyar rupiah pada tahun 2010.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Neni Pancawati (2000) menyebutkan bahwa faktor penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan negatif terhadap pertumbuhan output (GDP). Kelley dan Schmidt (1995) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan pendapatan perkapita.

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY mencapai 345.749 jiwa orang, dengan pembagian 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan yang tersebar di lima kabupaten/kota. Jumlah penduduk DIY semakin bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi, namun masih cukup terkendali. Dalam kurun waktu 15 tahun yakni antara tahun 1996 hingga 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah penduduknya mencapai lebih dari 3.000 jiwa orang.

Selama periode 2000-2010 Kabupaten Sleman dan Bantul memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun masing-masing sebesar 1,92 persen dan 1,55 persen. Sebaliknya, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan penduduk negatif sebesar 0,21 persen. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, Kota Yogyakarta pada tahun 2010 dihuni oleh 388.63 jiwa orang. Selama beberapa tahun terakhir, wilayah Kota Yogyakarta sudah semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya aktivitas perekonomian, pemerintahan dan sosial. Hal ini membawa konsekuensi terhadap perkembangan kawasan pemukiman dan

peningkatan jumlah penduduk di wilayah penyangganya, terutama di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi D.I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota
tahun 2006-2010 (jiwa orang)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010
Kulonprogo	382,66	384,33	385,94	387,49	388,87
Bantul	859,73	872,87	886,06	899,31	911,50
Gunungkidul	675,14	675,36	675,47	675,47	675,38
Sleman	1.015,52	1.035,03	1.054,75	1.074,67	1.093,11
Yogyakarta	392,80	391,82	390,78	389,69	388,63
DIY	3.325,85	3.359,40	3.393,00	3.426,64	3.457,49

Sumber : BPS D.I Yogyakarta tahun 2006-2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dari tahun 2006 hingga 2008, dan mengalami sedikit penurunan jumlah penduduk pada tahun 2009 dan 2010. Meskipun di Kota Yogyakarta sendiri mengalami pertumbuhan pendudukan yang cukup fluktuatif. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya di Kabupaten Sleman jumlah penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman sendiri merupakan kabupaten yang memiliki wilayah paling luas di banding kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai daerah dengan julukan kota pelajar dan memiliki perguruan tinggi yang cukup banyak baik swasta maupun negeri, tingkat pendidikan di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonominya. Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dengan berfokus pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Tingkat pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Tingkat Pendidikan siswa/siswi lulusan SMA/SMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2010 (jiwa orang)

Tahun	Tingkat Pendidikan siswa/siswi lulusan SMA/SMK
2006	36529
2007	32338
2008	33915
2009	32162
2010	35892

Sumber : BPS D.I Yogyakarta tahun 2006-2010

Tetapi keterkaitan masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih cukup tinggi, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai kebutuhan dan tuntutan daya saing.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan anggaran pemerintah daerah dari sisi penerimaan adalah indikator utama penentu perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah .

PAD adalah salah satu tolak ukur potensi fiskal daerah dan sebagai sumber penerimaan yang penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya terhadap daerah itu sendiri. Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerahpun semakin giat dalam meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan banyak macam cara, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada ataupun menggali sumber-sumber baru.

Sebagai propinsi dengan jumlah penduduk banyak di Indonesia yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami maupun karena migrasi masuk, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun hal ini belum dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang dilihat dari jumlah pengangguran yang masih mengalami kenaikan. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan terhadap jumlah penduduk yang besar dengan cara penyediaan lapangan kerja yang memadai atau peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengisi pasar kerja guna mengurangi jumlah pengangguran yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan sebagai propinsi yang memiliki perguruan tinggi yang cukup banyak baik swasta maupun negeri, tingkat pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonominya. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan

jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Namun aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, angka putus sekolah masih cukup tinggi, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan daya saing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi D.I Yogyakarta. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 1996-2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kemandirian daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber pendanaannya. Hal ini sangat diharapkan sehingga dapat tercapai tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta?

3. Apakah tingkat pendidikan siswa/siswi lulusan SMA/SMK mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang tingkat pendidikan siswa/siswi lulusan SMA/SMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..
2. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan menulis serta untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.
3. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Isi dari pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II kajian pustaka dan landasan teori

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan, landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab metodologi penelitian akan menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis

Dalam bab hasil dan analisis terdapat ini dua sub bab yaitu data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya.

Bab V Simpulan dan implikasi

Simpulan merupakan simpulan dari hasil analisis yang digunakan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.